



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RACHMAT MULYADI
2. Jabatan : WAKIL CAMAT
3. NHK : 198315

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.064.840.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 632.840.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 319 m2/60 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 540 m2/100 m2 di KAB / KOTA PURWAKARTA, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 78 m2/78 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 285.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	2.900.000
1. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.900.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	183.957.339
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.251.697.339
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.251.697.339

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SULISTIO CAHYONO
2. Jabatan : WAKIL CAMAT
3. NHK : 449485

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 126 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	30.000.000
1. MOBIL, TOYOTA VIOS SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.035.000.000
III. HUTANG	Rp.	1.730.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	305.000.000

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RISKA HANDAYANI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS KECAMATAN**
3. NHK : **229072**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 53 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 575.100.000

1. MOTOR, PIAGGIO VESPA PRIMAVERA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 19.700.000
2. MOTOR, HONDA ADV Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.400.000
3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 345.000.000
4. MOBIL, BYD ATTO 1 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 450.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 252.500.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.528.100.000

III. HUTANG Rp. 1.856.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.672.100.000



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ELVITA RAHMADANI RANGKUTI
2. Jabatan : LURAH
3. NHK : 782549

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.450.000.000
1. Tanah Seluas 890 m2 di KAB / KOTA MANDAILING NATAL, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	290.000.000
1. MOBIL, HONDA CRV RN1 2WD 2.0 AT SKD Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 235.000.000		
2. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	563.400.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	25.653.072
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.329.053.072
III. HUTANG	Rp.	185.358.468
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.143.694.604

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALIM QOMARIYAH
2. Jabatan : KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT
3. NHK : 274719

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.800.100.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/200 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.100.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 152.000.000

1. MOBIL, HONDA BRV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, HONDA H1B02N42L0 A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
3. MOTOR, HONDA H1B02N41LO A/T Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 355.200.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 766.101.744

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 450.276.686

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.523.678.430

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.523.678.430

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NDARI SULISTIARTI
2. Jabatan : KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
3. NHK : 878506

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	15.000.000
1. MOTOR, HONDA SPD. MOTOR / NF 125TR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000		
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	83.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	105.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	203.000.000
III. HUTANG	Rp.	10.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	193.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SITI ROTIKAH
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 437987

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	----
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	----
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	82.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	589.623.988
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	671.623.988
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	671.623.988

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KASMAWATI
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN
3. NHK : 799430

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	775.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 42 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 382.000.000		
2. Tanah Seluas 294 m2 di KAB / KOTA BONE, HASIL SENDIRI Rp. 131.000.000		
3. Bangunan Seluas 43 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 262.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	5.800.000
1. MOTOR, HONDA K1H02N14L0 AT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.800.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	800.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	101.162.837
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	882.762.837
III. HUTANG	Rp.	508.440.212
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	374.322.625

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAPTO BIROWO
2. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
3. NHK : 222742

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 269.936.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 161.414.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 76.680.000
3. Tanah Seluas 170 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 10.880.000
4. Tanah Seluas 70 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 4.480.000
5. Tanah Seluas 201 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 16.482.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 405.500.000

1. MOTOR, JINCHENG SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
2. MOBIL, TOYOTA MINI BUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 405.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 500.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 675.936.000



III. HUTANG

Rp. 321.833.741

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 354.102.259

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.